



Selasa, 4 Mei 2021

1. **AIA Financial Bukukan Aset Rp 53 Triliun Sepanjang 2020**  
[CNBCIndonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 03-05-2021

Home / Money / Rilis

## AIA Financial Bukukan Aset Rp 53 Triliun Sepanjang 2020

Kompas.com - 03/05/2021, 21:14 WIB

BAGIKAN:    

Komentar 



Petugas Customer Service PT AIA FINANCIAL (AIA) menggunakan masker dan pelindung wajah saat melayani nasabah di Customer Service Center, AIA Central, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2020). (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Penulis: Ade Miranti Karunia | Editor: Bambang P. Jatmiko

**JAKARTA, KOMPAS.com** - PT **AIA Financial** mencatatkan kinerja di tahun buku 2020 dengan mengumpulkan aset sebesar Rp 53,3 triliun, meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 50 triliun.

Sementara itu pendapatan premi yang dibukukan senilai Rp 13,5 triliun dengan rasio pencapaian solvabilitas hingga 630 persen.

Adapun total klaim dan manfaatnya yang dibayarkan kepada nasabah sepanjang 2020 sebesar Rp 3,2 triliun dari produk asuransi konvensional serta unit syariah.

**Baca juga:** [Jiwasraya Tak Akan Lagi Beroperasi sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa](#)

"Pencapaian kinerja perusahaan adalah wujud kesiapan kami sebagai perusahaan asuransi untuk membantu nasabah menjalani hidup di tengah pandemi serta merupakan upaya berkelanjutan dari seluruh tim yang terlibat di AIA," ujar Presiden Direktur AIA Sainthan Satyamoorthy dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

"Kami sadar peran kami di masa yang sangat menantang ini begitu besar, untuk memberikan proteksi bagi masyarakat serta membantu mereka menjalani masa pandemi dengan rasa tenang," tuturnya.

## 2. Premi Asuransi Jiwa Selalu Capai Rekor Pada Januari, Ternyata Karena ini [Bisnis.com](https://bisnis.com)/ 03-05-2021

Home • Finansial • Asuransi

### Premi Asuransi Jiwa Selalu Capai Rekor pada Januari, Ternyata Karena Ini

Misalnya saja pada kuartal I/2021, perolehan premi tertinggi terjadi pada Januari 2021 dengan premi Rp19,09 triliun.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com  
03 Mei 2021 | 14:35 WIB



Karyawan berkomunikasi di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Selasa (15/1/2020). *Bisnis* - Nurul Hidayat

**Bisnis.com, JAKARTA** — Industri asuransi jiwa mencatatkan premi tertinggi pada bulan Januari dalam kuartal I beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses pemasaran yang panjang hingga pembayaran premi berkala.

Berdasarkan statistik asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maret 2021, sepanjang kuartal I/2021 industri asuransi jiwa mencatatkan premi Rp50,8 triliun. Jumlah itu tumbuh 24,7 persen (*year-on-year*) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp40,7 triliun.

Pada kuartal I/2021 itu, perolehan premi tertinggi terjadi pada Januari 2021 dengan premi Rp19,09 triliun. Perolehan preminya melambat pada Februari 2021 menjadi Rp15,5 triliun, tapi kembali meningkat pada Maret 2021 menjadi Rp16,2 triliun.

Pola yang sama terjadi pada 2020 dan 2019, yakni perolehan premi bulan Januari menjadi yang tertinggi dalam kuartal I. Premi Februari cenderung lebih rendah dari Januari, lalu kembali meningkat pada Maret.

Pada 2020, premi Januari tercatat senilai Rp15,2 triliun lalu turun pada Februari menjadi Rp12,8 triliun. Pada Maret 2020, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, premi industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp12,6 triliun.

Adapun, pada 2019, perolehan premi Januari tercatat senilai Rp15,5 triliun. Jumlahnya menurun pada Februari menjadi Rp13,6 triliun, tapi kembali meningkat pada Maret menjadi Rp15,09 triliun atau hampir mendekati posisi Januari.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu membenarkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir catatan premi bulan Januari cenderung lebih tinggi. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang membuat perolehan premi terjadi pada awal tahun.

Pada 2020, premi Januari tercatat senilai Rp15,2 triliun lalu turun pada Februari menjadi Rp12,8 triliun. Pada Maret 2020, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, premi industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp12,6 triliun.

Adapun, pada 2019, perolehan premi Januari tercatat senilai Rp15,5 triliun. Jumlahnya menurun pada Februari menjadi Rp13,6 triliun, tapi kembali meningkat pada Maret menjadi Rp15,09 triliun atau hampir mendekati posisi Januari.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu membenarkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir catatan premi bulan Januari cenderung lebih tinggi. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang membuat perolehan premi terjadi pada awal tahun.

"Juga bisa dimungkinkan dari hasil pendekatan agen kepada calon pemegang polis pada tahun sebelumnya yang baru *close* pada Januari," ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (3/5/2021).

Menurutnya, proses penjualan asuransi jiwa membutuhkan waktu, terlebih bagi polis unit-linked yang membutuhkan interaksi langsung antara tenaga pemasar dengan calon nasabah. Hal tersebut membuat penandatanganan polis tidak selalu langsung terjadi di awal proses pemasaran. "Jarang sekali, baru ditawarkan sekali calon pemegang polisnya langsung mau beli," ujar Togar.

Adapun, pembayaran klaim asuransi jiwa sepanjang kuartal I/2021 tercatat senilai Rp16 triliun atau turun 6,8 persen (*yoy*) dari sebelumnya Rp17,16 triliun. Perolehan investasi industri telah berbalik untung pada kuartal I/2021 yang mencapai Rp2,7 triliun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya senilai -Rp43,6 triliun.

Kondisi tersebut membuat laba industri asuransi jiwa pada kuartal I/2021 sebesar Rp1,7 triliun, berbalik untung dari periode yang sama tahun sebelumnya yang merugi Rp844 miliar. Aset industri pada kuartal I/2021 senilai Rp549,6 triliun pun tumbuh 10,7 persen (*yoy*) dari sebelumnya Rp496,2 triliun.

### 3. OJK Minta Direksi Bumiputera Jalankan Kesepakatan Pembentukam Panitia Pemilihan BPA [Bisnis.com/ 03-05-2021](https://bisnis.com/03-05-2021)

Home • Finansial • Asuransi

#### OJK Minta Direksi Bumiputera Jalankan Kesepakatan Pembentukan Panitia Pemilihan BPA

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat OJK nomor S-32/NB.23/2021 yang diperoleh *Bisnis* bertanggal 3 Mei 2021.

 Widi Pengantar Pratama - Bisnis.com  
03 Mei 2021 | 17:25 WIB



Pekan kali melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta. *Bisnis*

**Bisnis.com, JAKARTA** — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan Direksi AJB Bumiputera 1912 untuk melaksanakan kesepakatan terkait pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA). Penetapan susunan panitia itu sedang diproses oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal tersebut tercantum dalam salinan surat OJK nomor S-32/NB.23/2021 yang diperoleh *Bisnis*. Surat bertanggal 3 Mei 2021 itu berisi mengenai tindak lanjut hasil kesepakatan pada 16 Maret 2021 yang ditujukan bagi Direksi Bumiputera.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh *Bisnis* itu, Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlisin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan secara daring dengan manajemen Bumiputera, serikat pekerja Bumiputera, asosiasi agen Bumiputera, dan perwakilan pemegang polis pada Rabu (26/4/2021).

Dalam pertemuan itu, OJK meminta perkembangan informasi terkait tindak lanjut atas kesepakatan yang dibentuk seluruh pihak dalam pertemuan di Kantor IKNB OJK, Wisma Mula 2, Jakarta pada 16 Maret 2021. Saat itu, seluruh pihak menyepakati pembentukan panitia pemilihan BPA dalam pertemuan yang difasilitasi OJK.

"Berdasarkan pertemuan tanggal 28 April 2021 diketahui bahwa penetapan panitia pemilihan BPAAJB Bumiputera saat ini sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jadwal sidang penetapan pertama pada tanggal 4 Mei 2021," tulis Muchlisin dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis* pada Senin (3/5/2021).

Dia pun menjabarkan bahwa berkenaan dengan hal tersebut serta memperhatikan hasil kesepakatan dengan para pemegang polis dan pihak terkait, OJK meminta manajemen Bumiputera untuk melaksanakan hasil kesepakatan pada 16 Maret 2021 dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Salah satu peran direksi dalam kesepakatan itu adalah menjadi penanggung jawab utama atau panitia teknis pusat saat pemilihan BPA.

OJK pun memerintahkan direksi untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan pihak-pihak yang hadir dalam rapat 16 Maret 2021. Menurut Muchlisin, Direksi Bumiputera harus menjaga polensi kegaduhan jika terdapat salah satu atau beberapa pihak yang melakukan upaya tersendiri.

Selain itu, otoritas pun memerintahkan Direksi Bumiputera untuk menindaklanjuti penetapan susunan panitia pemilihan BPA yang saat ini berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kami minta agar Saudara [Direksi Bumiputera] menjaga situasi di internal AJB Bumiputera maupun dengan pihak terkait tetap berjalan kondusif, untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh pihak yang bersepakat," tulis Muchlisin.

Adepun, berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bisnis*, susunan panitia pemilihan BPA ditetapkan oleh direksi Bumiputera pada 31 Maret 2021. Dokumen itu bertajuk Susunan Personalia Panitia Teknis & Panitia Seleksi serta Panitia Pengawas Independen Pemilihan Anggota BPA Periode 2021-2026.

Terdapat empat pihak yang masuk dalam susunan kepanitiaan, yakni unsur manajemen yang diwakili direksi Bumiputera, unsur pekerja, unsur agen, dan perwakilan pemegang polis. Unsur pemegang polis terdiri dari tiga kelompok, yakni Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia (Kornas), Nasabah Korban Gagal Bayar (NKGB) Bumiputera, dan Perhimpunan Pemegang Polis Bumiputera (Pempol Bumi). Sementara unsur lainnya adalah Asosiasi Agen Bumiputera Indonesia (AABI) serta Serikat Pekerja Naga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) Bumiputera.

Berikut susunan panitia Pemilihan Anggota BPA Bumiputera berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bisnis*:

Panitia Teknis Pusat

Ketua: Dena Chaerudin (Direksi)

Wakil Ketua: Firman Alamsyah

Sekretaris: Reri Anggraeni

Bendahara: Tigtuma Evderia Rinto

Panitia Seleksi

Ketua: Nirwan Daud (Kornas)

Anggota: 1. Sukardi Pujohutomo

2. Amri Sahri

3. Jaka Irvanta (Pempol Bumi)

4. Imam Basuki (NKGB)

Panitia Pengawas

Ketua: Hery Darmawansyah (Sekper Bumiputera)

Anggota: 1. Yayat Supriyatha (Kornas)

2. Erwinsyah Nasution (Kornas)

3. Darnayanti Tarigan (Kornas)

4. Fien Mangini (NKGB)

5. Rudhi Mukhtar Eko Putera (NKGB)

6. Mohammad Syakur Usman (NKGB)

7. Warsuli (Pempol Bumi)

8. Supri (Pempol Bumi)

9. Islandri (AABI)

10. Alex Kurniawan (AABI)

11. Suradij (AABI)

12. Rizky Yudha Pratama (SP NIBA)

13. Panser Karo-Karo (SP NIBA)

14. F. Ghulam Naja (SP NIBA)

Susunan panitia itu diserahkan oleh sejumlah pemegang polis Bumiputera ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (6/4/2021). Satu bulan setelahnya atau besok, Selasa

#### 4. Nasabah Kresna Menjerit, Buat Surat Terbuka Ke Mahfud MD

[CNBCIndonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 03-05-2021

### Nasabah Kresna Life Menjerit, Buat Surat Terbuka ke Mahfud MD

MARKET - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia | 03 May 2021 12:40



Foto: kresna life insurance

**Jakarta, CNBC Indonesia** - Perkara gagal bayar Asuransi Jiwa Kresna (AJK) atau Kresna Life masih terus bergulir. Kali ini, salah satu nasabah Kresna Life membuat surat terbuka kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD karena pencairan klaim yang berbelit dan belum dibayarkan.

Ady Saputra dan keluarganya adalah satu dari sekian banyak nasabah AJK yang menginvestasikan dana cukup besar di AJK. Berbekal reputasi Kresna Group yang dimiliki Michael Steven, Ingrid dan Kurniadi Sastrawinata ini dan menaruh seluruh tabungan dengan jumlah miliaran Rupiah.

Namun kenyataannya justru berkebalikan, Kresna Life gagal memenuhi janjinya dan menolak untuk mencairkan tabungan Ady dan keluarga yang telah jatuh tempo.

"Ayah saya yang kondisi kesehatan kurang baik, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik karena dana keluarga kami yang ludes dimakan Kresna. Ayah saya akhirnya meninggal dunia tanggal 25 Maret 2020 yang menyebabkan kesedihan keluarga yang mendalam," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (3/5/2021).

Ady menilai bahwa ada polis asuransi jiwa di Kresna, maka keluarga kembali mengajukan klaim meninggal ke Kresna dengan pemikiran bahwa Asuransi ada perusahaan reasuransi.

"Jadi semestinya Kresna akan membayar klaim meninggal ayah saya walau tabungan kami mandek. Jawaban Kresna sungguh mengejutkan bahwa ternyata klaimpun ditolak dengan alasan telat penyerahan 15 hari," ujarnya.

Ia pun kecewa dengan apa yang dijanjikan AJK bahwa asuransi seharusnya bisa sebagai proteksi di masa sulit, terbukti kosong. Kenyataannya di saat ekonomi sulit karena pandemik, tabungan keluarganya tidak bisa ditarik, lalu ayahnya yang sakit akhirnya harus berpulang karena beban pikiran dan kurangnya dana untuk bisa memberikan pengobatan terbaik.

"Bahkan harus menerima kenyataan pahit berupa penolakan uang manfaat meninggal yang merupakan hak keluarga kami," jelasnya.

Oleh sebab itu, para nasabah AJK saat ini, kata Ady hanya perlu keadilan dan laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan nasabah agar diproses sesuai aturan yang berlaku.

"Jangan dibuat mandek dan sama nasibnya seperti kasus Indosurya di Dittipideksus Mabes yang sudah setahun lebih mandek. Tolong atensi kasus kami agar kami peroleh kepastian hukum," tandasnya.

CNBC Indonesia sudah mencoba menghubungi Michael Steven melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari Michael.

Michael Steven adalah Pendiri dan Direktur Utama PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), grup bisnis di sektor keuangan dan teknologi. Ia mendirikan KREN di tahun 1999 sebagai sebuah investment bank tradisional yang bergerak di bidang investments management, securities brokerage, dan underwriting.

Kresna Life, tergabung dalam Kresna Group yang berdiri sejak tahun 1991, perusahaan ini menawarkan produk asuransi jiwa secara komprehensif untuk kategori individu maupun kelompok, dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 5. Pendapatan premi naik, laba MSIG Life tumbuh 41,5% sepanjang 2020 CNBCIndonesia.com/ 03-05-2021

KEUANGAN / ASURANSI

### Pendapatan premi naik, laba MSIG Life tumbuh 41,5% sepanjang 2020

Senin, 03 Mei 2021 / 09:37 WIB



ILUSTRASI. Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life baru Wianto Chen. TRIBUNNEWS/HD

Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 tidak menyurutkan kinerja PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (MSG Life). Perusahaan masih mampu membukukan pertumbuhan laba hingga 41,5% yang menjadi Rp 332,7 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan MSIG Life yang dipublikasikan, pertumbuhan laba tersebut juga dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan premi yang ditorehkan oleh perusahaan. Tercatat, pendapatan premi MSIG Life naik 11,5% yoy atau menjadi Rp 3,7 triliun.

Meskipun demikian, kondisi pandemi covid-19 tampaknya masih memberikan pengaruh terhadap beban klaim yang harus dibayar oleh perusahaan. Ada kenaikan beban klaim dan manfaat yang harus dibayar menjadi Rp 2,3 triliun dan berarti naik sebesar 12% yoy.

Baca Juga: **Sinarmas MSIG Life meluncurkan produk SIX, beri perlindungan ganda di masa pandemi**

Selain itu, MSIG Life juga masih mengalami penurunan dalam total aset yang dikelola sepanjang 2020. Total aset perusahaan berkurang hingga 2% yoy menjadi Rp 15,2 triliun.

Penurunan juga terjadi pada hasil investasi perusahaan yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Hasil investasi MSIG Life tercatat sebesar Rp 638 miliar atau turun hingga 18% yoy.

## BPSK Gelar Sidang Mediasi Nasabah dan Manajemen WanaArtha Life

JAKARTA – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Senin (3/5), menyelenggarakan sidang ketiga terkait gagal bayar klaim antara nasabah dan manajemen PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life). Nasabah belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak manajemen lebih dari setahun belakangan.

Sidang ketiga berhasil diselenggarakan Senin (3/5) pagi, di BPSK, Jakarta, meskipun pihak Manajemen Wanaartha Life hanya diwakili oleh kuasa hukum. Sidang pun belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan nasabah. Terlebih, pihak Wanaartha terkesan terus mengulur waktu dalam mediasi itu.

Ketua Perkumpulan Pemegang Polis Wanaartha (P3W) Johannes Buntoro Fistanio menyampaikan, sidang pertama batal terselenggara karena pihak termohon tidak hadir. Hal serupa kembali terjadi pada sidang mediasi kedua. Dalam hal ini, pihak Wanaartha minta jadwal mediasi diundur. Meski begitu, manajemen perusahaan pun tidak kunjung menampakkan dirinya di sidang ketiga.

“Jadi sidang kali ini hanya bisa mendengar keluhan dari kami. Kami mempertanyakan banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh kuasa hukum, sehingga pertanyaan itu mesti

disampaikan kembali ke manajemen Wanaartha dan akan dijawab pada sidang berikutnya. Sidang selanjutnya akan digelar pada 17 Mei 2021,” jelas Johannes kepada *Investor Daily* di Jakarta.

Dia mengatakan, ketidakkehadiran manajemen Wanaartha Life itu begitu disayangkan. “Kami ini *kan* sebagai korban sudah menunggu setahun lebih tapi tidak ada respon dari Wanaartha. Hanya melakukan komunikasi dengan nasabah saja mereka tidak mau. Jadi kami harap pada sidang nantinya kami bisa mendapatkan jawaban yang terbaik, informasi yang benar, agar semua jelas,” ucap Johannes.

Gagal bayar klaim oleh WanaArtha Life disebut telah secara nyata berdampak pada kesejahteraan nasabah. Johannes mengatakan, ada nasabah yang anaknya terpaksa putus pendidikan, tidak mampu bayar rumah sakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tidak ada langkah proaktif dari WanaArtha Life pada nasabah-nasabah tersebut.

Dia menuturkan, hal serupa bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, para nasabah masih terus berjuang menuntut hak-haknya agar bisa dikembalikan. Itikad baik sebagai nasabah ditempuh melalui dukungan BPSK. Pihaknya pun bersyukur

BPSK berkomitmen mendukung penuntasan permasalahan antara nasabah dan Wanaartha Life.

“Kami disambut baik oleh wakil BPSK secara langsung. Karena sudah banyak kasus asuransi yang sudah terjadi, dia empati kepada kami dan mau bersuara,” ungkap Johannes.

Lebih lanjut, Johannes mengatakan, saat ini yang nasabah tahu adalah pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa manajemen WanaArtha Life sedang melakukan perbaikan dan pembenahan. Hal itu diketahui dari surat balasan OJK kepada nasabah medio Maret 2021.

Lebih dari itu, para nasabah sesungguhnya juga ingin mengetahui skema perbaikan yang dimaksud, laporan keuangan terkini, serta nilai pasti dari dana Wanaartha yang di blokir oleh Kejaksaan Agung. Johannes mengungkapkan, santer tersiar di kalangan nasabah bahwa tidak semua dana perusahaan diblokir.

“Laporan keuangan tahun 2019 itu Wanaartha memiliki dana sebesar Rp 4,7 triliun. Sedangkan kabarnya, dana yang diblokir oleh Kejaksaan Agung hanya Rp 2,7 triliun. Ini kami perlu klarifikasi, jikapun salah, kami perlu jawaban langsung dari Wanaartha. Perusahaan sampai saat ini belum juga menunjukkan dirinya,” tegas Johannes. (pri)

## 7. Jaga Momentum Penyaluran Kredit untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Detik.com/ 03-05-2021

### Jaga Momentum Penyaluran Kredit untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Abu Ubaidillah - detikFinance

Senin, 03 Mei 2021 18:20 WIB

0 komentar

SHADE



Foto: OJK

**Jakarta** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memonitor indikator perbaikan data perekonomian global dan domestik untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi yang didukung oleh pelaksanaan vaksinasi sebagai game changer dan stimulus yang dikeluarkan OJK, Pemerintah dan Bank Indonesia. Peran keuangan syariah juga didorong dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dilansir dari situs resminya, Senin (3/5/2021), OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap keberhasilan proses restrukturisasi yang dilakukan lembaga jasa keuangan, termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

#### Asesmen Sektor Jasa Keuangan



OJK Foto: OJK

Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhan kredit. Stimulus PPNNM untuk kendaraan bermotor, relaksasi ATMR dan Loan To Value (LTV) untuk kendaraan bermotor dan properti yang dikeluarkan Pemerintah, OJK dan BI berhasil mendorong laju penjualan mobil pada Maret menjadi 84,9 ribu atau tumbuh 73% mtm.

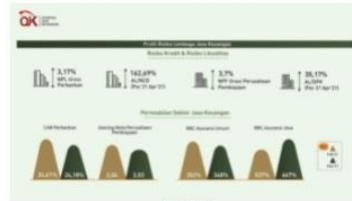
Kenaikan juga terlihat pada pertumbuhan KPR serta premi asuransi kendaraan bermotor dan properti. OJK juga sudah meminta industri perbankan untuk meningkatkan implementasi kebijakan stimulus lanjutan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

OJK mencatat bahwa berdasarkan data Maret 2021, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh di level tinggi sebesar 0,49% yoy. Pertumbuhan kredit masih negatif namun menunjukkan perbaikan secara bulanan (mtm).

Kredit pada Maret 2021 tercatat tumbuh Rp77,3 triliun mtm yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan kredit di sektor transportasi, pertanian dan konstruksi masih tumbuh positif.

Penghimpunan dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat seiring pertumbuhan jumlah investor domestik dan emiten baru. Pertumbuhan pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui peer to peer lending (P2P Lending).

#### Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan



OJK Foto: OJK

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Maret 2021 masih terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,17% (NPL net: 1,02%) dan Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Maret 2021 turun menjadi 3,7 persen (Februari 2021: 3,9 persen). Sementara itu, likuiditas dan modalan perbankan berada pada level yang memadai.

Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 21 April 2021 terpantau pada level 162,66% dan 35,17%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Modalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini tetap terjaga pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 24,18 persen.

Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 687 persen dan 346 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang sebesar 2,03x, jauh di bawah batas maksimum 10x.

#### Realisasi Program Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



OJK Foto: OJK

Outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi perbankan akibat pandemi COVID-19 per Maret 2021 menunjukkan tren menurun dibandingkan Desember 2020. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik.

Program restrukturisasi kredit perbankan hingga 30 Maret 2021 telah mencapai nilai Rp 808,75 triliun dan 5,55 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp 310,5 triliun berasal dari 3,89 juta debitur.

Untuk perusahaan pembiayaan, per 26 April 2021, realisasi pemohonan restrukturisasi yang sudah disetujui sebanyak 5,09 juta kontrak dengan total nilai mencapai Rp 198,27 triliun.

#### Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia



OJK Foto: OJK

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, peran sektor jasa keuangan menjadi sangat krusial sebagai katalisator dan motor penggerak, termasuk tentunya peran dari sektor ekonomi dan keuangan Syariah.

Sektor jasa keuangan Syariah terbukti memiliki resiliensi atau daya tahan yang baik di masa pandemi hingga periode recovery saat ini. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depannya.

#### Baca Juga:

**OJK Bangun Data Center Fintech buat Pantau Nasabah Nakal**

Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia antara lain pertama, mewujudkan Bank Syariah berskala besar dengan tujuan menjadi pengampu sektor keuangan syariah, serta meningkatkan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing.

Kedua, memperluas akses pemasaran industri halal dengan cara perluasan instrumen pembiayaan untuk industri halal dan perluasan pemasaran produk industri halal melalui platform digital (UMKMMU).

Lalu ketiga, membangun ekosistem ekonomi keuangan Syariah terintegrasi melalui pemberdayaan umat, memperluas akses pembiayaan dalam satu ekosistem keuangan syariah terintegrasi dan digitalisasi sektor jasa keuangan syariah.

#### Dukungan OJK Terhadap Keuangan Berkelanjutan

Sektor jasa keuangan merupakan motor penggerak dalam pembiayaan berkelanjutan. OJK mendorong sektor jasa keuangan baik perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal untuk menyalurkan green financing. OJK mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) untuk mempercepat transisi sektor jasa keuangan ke arah berkelanjutan.

Beberapa inisiatif yang dilakukan OJK dalam mendukung Keuangan Berkelanjutan antara lain:

- Mendukung transisi pembiayaan konvensional ke green/sustainability project dan mendukung skema Blended Finance di Indonesia;
- Menopikan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung Keuangan Berkelanjutan;
- Menginisiasi pengembangan Taksonomi Hijau Indonesia yang dikordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait;
- Mengembangkan taksonomi Keuangan Berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara melalui keterlibatan aktif sebagai anggota dalam ASEAN Taxonomy;
- Mengembangkan proyek percontohan model bisnis berkelanjutan (Sustainable Business Model Pilot Project) di sektor pariwisata dan perikanan;
- Mengembangkan pusat informasi Keuangan Berkelanjutan untuk menginformasikan perkembangan Keuangan Berkelanjutan; dan
- Menjadi pendiri Sustainable Banking Network (SBN) dan anggota Network for Greening the Financial System (NGFS) yang merupakan forum bagi bank sentral dan otoritas pengawas untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan.

Terkait perkembangan Green Finance di Indonesia, saat ini 14 Lembaga Jasa Keuangan (termasuk 8 first movers on sustainable banking) telah bergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI).

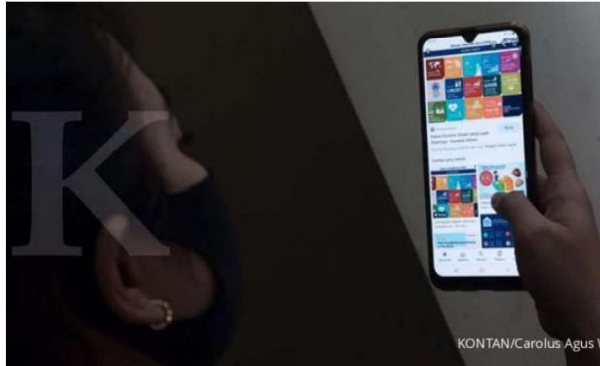
(ncm/hns)

## 8. Nasabah Unitlink Diwajibkan Punya Nomor Identitas Investor Kontan.co.id / 03-05-2021

KEUANGAN / ASURANSI

### Nasabah unitlink diwajibkan punya nomor identitas investor

Senin, 03 Mei 2021 / 19:33 WIB



ILUSTRASI. Nasabah mengamati produk asuransi yang ditawarkan melalui kanal digital di Jakarta.

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Yudho Winarto**

**KONTAN.CO.ID - JAKARTA.** Tidak lama lagi, Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan peraturan mengenai pemasaran dan investasi produk unitlink pada tahun ini.

Melalui ketentuan tersebut, nantinya nasabah asuransi unitlink wajib memiliki nomor identitas investor pasar modal atau dikenal dengan investor identification (SID).

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan, bahwa penyusunan itu memang diperlukan. Alasannya, agar pemegang polis memahami investasi pada instrumen pasar modal.

"Meningkat, unitlink merupakan produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi di pasar modal," kata Sekar, Senin (3/5).

Hingga saat ini, aturan masih digodok oleh OJK. Sebelumnya, lembaga pengawas di sektor keuangan ini menyebut draft aturan tersebut sudah masuk tahap finalisasi dan diharapkan terbit pada kuartal II 2021.

Menanggapi ketentuan itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan bahwa industri siap menerapkannya sesuai ketetapan regulator. Apalagi, penggunaan SID dinilai menguntungkan nasabah karena mereka bisa mengetahui perkembangan investasi secara mandiri.

"Penggunaan SID ini juga akan menyadarkan pemegang polis bahwa unsur investasi produk ini, risikonya ditanggung oleh pemegang polis," kata Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu, Senin (3/5).

Menurut Togar, unitlink merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Sebagaimana natur produk asuransi jiwa, proteksi dan perencanaan keuangan jangka panjang yang menjadi tujuan utama.

Sementara masa pembayaran premi unitlink adalah sepanjang kontrak atau seumur hidup, agar unit investasi dapat berkembang secara optimal.

Bisa saja hanya bayar premi selama 10 tahun, namun dengan syarat unit investasi yang sudah berkembang dapat digunakan untuk membayar premi pada tahun ke-11 dan seterusnya.

"Dampaknya unit investasi akan berkurang. Kami sangat sarankan agar premi dibayar setiap tahun hingga kontrak selesai demi hasil investasi yang optimal," terang Togar.

Salah satu pemain, Allianz Life Indonesia mengaku sudah menerima draft ketentuan dari OJK terkait unitlink. Saat ini, perusahaan sedang meninjau apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Pada prinsipnya Allianz Life Indonesia senantiasa mendukung upaya OJK untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah, khususnya nasabah unitlink," kata Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen.

Seperti diketahui, draft aturan tersebut mengatur pembatasan investasi unitlink. Di antaranya mengatur pembatasan investasi pada grup terafiliasi atau satu pihak agar risiko tidak terpusat pada satu tempat.

Jika ditemukan investasi yang terkonsentrasi pada satu tempat, OJK tak segan-segan memanggil dan meminta penjelasan kepada perusahaan. Setelah itu, mengambil langkah-langkah agar perusahaan memperbaiki strategi investasi.

Bahkan, OJK sedang mengembangkan aplikasi untuk memantau portofolio dan pergerakan investasi di industri asuransi. Dengan begitu, regulator tidak perlu menunggu laporan investasi yang dilaporkan setiap bulan dari perusahaan asuransi.

## 9. Aturan Unitlink: SID Unitlink Bantu Nasabah Pahami Risiko Investasi Kontan / 04-05-2021

### ■ ATURAN UNITLINK

# SID Unitlink Bantu Nasabah Pahami Risiko Investasi

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan peraturan mengenai pemasaran dan investasi produk unitlink pada tahun ini.

Melalui ketentuan tersebut, nasabah asuransi unitlink wajib memiliki nomor identitas investor pasar modal atau dikenal dengan *single investor identification* (SID).

Juru Bicara OJK, Sekar Puthi Djarot menjelaskan, penyusunan aturan itu diperlukan agar pemegang polis memahami risiko investasi pada instrumen pasar modal. "Meningkatkan, unitlink merupa-

kan produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi di pasar modal," kata Sekar, Senin (3/5).

Hingga saat ini, aturan masih digodok oleh OJK. Sebelumnya, lembaga pengawas di sektor keuangan ini menyebutkan, draf aturan tersebut sudah masuk tahap finalisasi dan diharapkan terbit pada kuartal II 2021.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, menyatakan, industri asuransi siap menerapkan sesuai ketentuan regulator. Apalagi,

penggunaan SID dinilai menguntungkan nasabah karena mereka bisa mengetahui perkembangan investasi secara mandiri.

"Penggunaan SID ini juga akan menyadarkan pemegang polis bahwa unsur investasi produk ini, risikonya ditanggung oleh pemegang polis," kata Togar, Senin (3/5).

Allianz Life Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang menawarkan unitlink di Tanah Air mengaku sudah menerima draf ketentuan dari OJK terkait unitlink. Saat ini, perusahaan ini sedang menin-

jau apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

"Pada prinsipnya Allianz Life Indonesia senantiasa mendukung upaya OJK untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah," kata *Chief Marketing Officer* Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen.

Seperti diketahui, draf aturan tersebut juga mengatur pembatasan investasi unitlink. Di antaranya mengatur pembatasan investasi pada grup terafiliasi atau satu pihak agar risiko tidak terpusat pada satu tempat.

Jika ditemukan investasi yang terkonsentrasi pada satu tempat, OJK akan meminta perusahaan terkait mengambil langkah agar perusahaan tersebut memperbaiki strategi investasinya.

Bahkan, OJK sedang mengembangkan aplikasi untuk memantau portofolio dan pergerakan investasi di industri asuransi. Dengan begitu, regulator tidak perlu menunggu laporan investasi yang dilaporkan setiap bulan oleh perusahaan asuransi.

Ferrika Sari